

GOOD GOVERNANCE, ETHICAL CULTURE, AND LEADERSHIP: THE IMPLICATIONS ON ACCOUNTING FRAUD IN THE KAMPAR REGIONAL GOVERNMENT AGENCY

Setyo Ardian Topan^{1*}, Andreas², dan Rusli³

^{1,2,3}Universitas Riau

Email: setyoardiantopan@gmail.com^{1*}

*Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i3.5122>

Received: 01/07/2025, Revised: 30/07/2025, Accepted: 25/08/2025

ABSTRACT

This study has the aim of examining the extent of the influence of the implementation of good governance, organisational ethical culture and leadership style on a tendency for accounting fraud in Regional Apparatus Organisations (OPD) of Kampar Regency, Riau Province. This research is based on the Fraud Hexagon Theory which is used as a theoretical framework in analysing the factors that cause accounting fraud. The method used in this research is a descriptive approach with a type of qualitative research that utilises primary and secondary data. Secondary data distribution was carried out by providing questionnaires to respondents and conducting documentation. Secondary data is obtained through literature sources such as books, journal notes and results from previous studies. In this study, the research population included 30 OPDs in Kampar Regency. then this population also became the research sample. The survey which is a data collection technique is used using a questionnaire instrument. While to analyse the data this study used multiple linear regression using the help of SPSS version 26.0 software. The results found that of the three independent variables, leadership has a significant influence on the tendency of accounting fraud. This is then evidenced through the calculated T value of each variable which is statistically significant, thus strengthening the conclusion that these factors play an important role in reducing the potential for accounting fraud in the OPD environment of Kampar Regency.

Keywords: *accounting fraud tendency, good governance, organizational ethical culture, leadership style*

GOOD GOVERNANCE, BUDAYA ETIS, DAN KEPEMIMPINAN: IMPLIKASINYA PADA KECURANGAN AKUNTANSI DI OPD KAMPAR

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penerapan *good governance*, budaya etis organisasi serta gaya kepemimpinan terhadap suatu kecenderungan terjadinya kecurangan pada akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini berlandaskan pada teori Fraud Hexagon yang digunakan sebagai kerangka teoritis dalam menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data primer serta sekunder. Penyebaran data sekunder dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden serta melakukan dokumentasi. Data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber literatur seperti buku, catatan jurnal serta hasil dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini populasi penelitian mencakup 30 OPD di Kabupaten Kampar. kemudian populasi ini sekaligus menjadi sampel penelitian. Survei yang menjadi teknik pengumpulan data digunakan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Sementara untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.0. Hasil penelitian menemukan bahwa dari ketiga variabel independen kepemimpinan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Hal ini kemudian dibuktikan melalui nilai T hitung dari masing-masing variabel yang secara statistik signifikan, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam mengurangi potensi kecurangan akuntansi di lingkungan OPD Kabupaten Kampar.

Kata kunci: *kecenderungan kecurangan akuntansi, good governance, budaya etis organisasi, gaya kepemimpinan*

PENDAHULUAN

Salah satu ancaman utama yang dihadapi oleh suatu sektor, khususnya dalam sektor pemerintahan, adalah kecurangan dalam akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diibaratkan sebagai “benalu” dalam sistem sosial organisasi, karena dapat merusak tatanan birokrasi serta menghambat efektivitas pelaksanaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Menurut Anres (2011), kecurangan merupakan tindak penipuan yang telah dilakukan dengan sengaja yang memiliki tujuan menguasai hak milik orang lain atau pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak sah.

Fraud merupakan tindakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti korupsi, pemalsuan data, menyembunyikan fakta, penyalahgunaan informasi maupun tanggung jawab, serta penggelapan aset (Albar & Fitri, 2018). Tindakan ini berakar dari kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi, melalui pemanfaatan aset atau sumber daya perusahaan secara tidak sah. Kecenderungan tersebut dikenal sebagai bentuk kecurangan akuntansi yang terjadi karena adanya eksploitasi atas posisi kerja yang dimiliki individu (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2020).

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, aparat penegak hukum menetapkan 1.695 orang sebagai tersangka dari 791 kasus korupsi yang berhasil dipantau. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kasus dan tersangka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari seluruh kasus tersebut, ICW mencatat bahwa potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun, dengan nilai suap dan gratifikasi mencapai Rp 422 miliar, pemerasan sebesar Rp 10 miliar, serta pencucian uang senilai Rp 256 miliar. Salah satu bentuk kecurangan yang mendasari temuan ini adalah manipulasi laporan keuangan, di mana informasi yang disampaikan tidak menggambarkan kondisi nyata dari kejadian yang sebenarnya terjadi.

Mengungkap praktik kecurangan dalam suatu perusahaan membutuhkan waktu maupun tenaga serta biaya yang tidak sedikit oleh karenanya penting untuk menemukan metode yang efisien dalam mendeteksi indikasi kecurangan melalui laporan tahunan. Tiga bentuk kecurangan yang umum terjadi menurut Saftarini et al. (2015) adalah manipulasi laporan keuangan, penyelewengan aset, serta penyuaipan. Di Indonesia, topik tentang kecenderungan kecurangan akuntansi telah banyak diteliti oleh sejumlah peneliti seperti Ade (2020), Badewin, (2018), Dewi & Wirakusuma (2019), Rizqia & Diah (2022) dan Yulia et al (2021). Berbagai variabel telah digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut seperti budaya etis organisasi, gaya kepemimpinan serta implementasi dari tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good governance* untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap suatu kecenderungan terjadinya kecurangan dalam bidang akuntansi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan *good governance*, karena OPD bertugas mengelola anggaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di tingkat pemerintahan daerah. Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan OPD yang kompeten dan berkualitas. *Good governance* sendiri menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merespons harapan masyarakat dan mewujudkan tujuan serta visi bangsa. Sayangnya, praktik kecurangan masih kerap terjadi, baik di lembaga swasta maupun di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Pemerintah mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau yang biasa disebut SKPD menjadi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dalam rangka meningkatkan efektivitas birokrasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016. Salah satu kewajiban utama OPD adalah menyusun laporan keuangan yang akuntabel sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Kampar menargetkan penanganan lima perkara dugaan korupsi yang tengah diproses oleh korps Adhyaksa. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian, di mana wilayah ini turut terlibat dalam kasus kecurangan akuntansi. Dua kasus utama yang sedang didalami meliputi dugaan korupsi dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar serta pemberian fasilitas kredit untuk pembelian lahan kelapa sawit di Desa Siabu, Kecamatan Salo. Informasi ini dikutip dari Haluan Riau (2021) dan menunjukkan bahwa praktik korupsi bukan cuma terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga merambah ke pemerintah daerah.

Proyek yang didanai oleh anggaran tahun 2019 oleh pemerintah yaitu pembangunan instalasi rawat inap untuk kelas III di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar ini diduga menjadi sarana perilaku tindak pidana korupsi yang diduga memiliki nilai kerugian negara dengan capaian sejumlah Rp. 46 miliar. Para tersangka yang turut terlibat dalam kasus ini di dunia lalai dalam menjalankan tugas sehingga proyek yang dijadwalkan mulai tanggal 17 Mei hingga 22 Desember 2019 itu tidak mampu terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang sebelumnya telah ditentukan. Dugaan korupsi ini mencuat karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang telah dirancang (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Pada proyek pembangunan tahun 2019 yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 46.662.000.000, ditemukan banyak ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan spesifikasi dalam kontrak. Berdasarkan hasil penyidikan, beberapa komponen seperti lift dan kamar mandi belum dikerjakan, sementara item-item lain juga tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Proyek yang seharusnya selesai pada 22 Desember 2019 mengalami keterlambatan, sehingga dilakukan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender hingga 21 Maret 2020 melalui addendum perjanjian. Namun, pembangunan tetap tidak rampung hingga batas waktu tersebut. Hasil pemeriksaan fisik oleh ahli menunjukkan bahwa sejumlah pekerjaan dalam kontrak tidak dikerjakan oleh

penyedia. Akibatnya, berdasarkan audit, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 8.045.031.044,14 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Fraud Hexagon digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Fraud Hexagon adalah model teoritis yang dibangun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, termasuk Fraud Triangle, yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953. Model ini terdiri dari elemen-elemen berikut: teori, bukti, dan rasionalisasi. Selain itu, pada tahun 2004, sebuah elemen kunci lebih lanjut diperkenalkan: teori kecurangan yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson, yang kemudian mengarah pada penciptaan teori berlian kecurangan. Pada tahun 2011, Crowe mengembangkan teori ini dengan memperkenalkan konsep ego, yang disebutnya sebagai 'fraud'. Terakhir, pada tahun 2019, Vousinas mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan memasukkan unsur kolusi (Sagala & Siagian, 2021).

Definisi *good governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* yaitu sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui aturan-aturan yang menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk para pemegang saham. Istilah 'pihak' mengacu pada dewan, kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik internal maupun eksternal, yang memiliki hak dan kewajiban yang spesifik terhadap peran mereka (Sulistiyandari et al., 2024). Penerapan prinsip ini merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk memenuhi harapan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pelayanan publik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh implementasi *good governance* terhadap kecurangan akuntansi. Studi oleh Rizqia & Diah (2022) menemukan bahwa *good governance* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecurangan, yang berarti semakin baik penerapan *good governance*, semakin rendah kecenderungan terjadinya kecurangan. Namun, penelitian lain dari (Badewin, 2018) dan (Pangestutie, 2018) justru menunjukkan pengaruh positif signifikan, yaitu *good governance* terkait dengan peningkatan kecurangan. Perbedaan temuan ini menciptakan ketidakjelasan yang menjadi celah penelitian penting. Oleh karena itu, penelitian ulang diperlukan untuk mengkaji hubungan ini lebih mendalam dengan memperhatikan konteks dan metode yang digunakan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang peran *good governance* dalam mencegah kecurangan akuntansi.

Menurut Sagiv dan Schwartz dalam Yulia et al. (2021), etika budaya organisasi merupakan kumpulan persepsi yang membentuk sistem serta memiliki makna bagi suatu anggota organisasi yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Robbins dalam Wardah et al. (2022) menambahkan bahwa budaya etis ini sangat penting karena mengatur arah organisasi, juga mengatur tindakan yang boleh dilakukan atau tidak di dalam suatu organisasi serta mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi dengan baik, sekaligus menjadi instrumen dalam menghadapi suatu peluang maupun tantangan yang hadir baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Beragam penelitian menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Ade (2020), Dewi & Wirakusuma (2019), dan Chandrayatna & Sari (2019), menyimpulkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan, artinya budaya etis yang kuat dapat mengurangi kecenderungan kecurangan. Namun, penelitian lain oleh Badewin (2018) dan Yulia et al. (2021) justru menemukan pengaruh positif signifikan. Perbedaan temuan ini menciptakan gap penelitian yang menarik untuk dikaji kembali.

Menurut Kamal et al. (2019), metode yang digunakan seorang pemimpin dalam memimpin dengan tujuan mempengaruhi serta mengintegrasikan semua karyawan dengan harapan untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi disebut dengan gaya kepemimpinan. Kumalaningtyas (2013) menambahkan bahwa gaya kepemimpinan sendiri ialah suatu perilaku seorang pemimpin dalam mengarahkan karyawannya sesuai dengan keinginannya.

Beberapa penelitian, seperti Dewi & Wirakusuma (2019), dan Wijayanto (2020), menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Namun, Wijayanto (2020) menemukan hasil sebaliknya, yaitu pengaruh positif yang signifikan. Perbedaan hasil ini menciptakan gap penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi *good governance* dapat memengaruhi potensi terjadinya kecurangan akuntansi. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan individu atau kelompok dalam melakukan kecurangan. Ketiga, penelitian ini ingin mengevaluasi bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat berkontribusi terhadap kecenderungan praktik kecurangan akuntansi di lingkungan organisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Fraud Hexagon (*Fraud Hexagon Theory*)

Teori Fraud Hexagon dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019 melalui artikelnya yang berjudul *Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model*. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya seperti Fraud Triangle oleh Cressey pada tahun 1953, Fraud Diamond oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004, dan Fraud Pentagon oleh Marks pada 2011 (Putri et al., 2021). Fraud Hexagon memperkenalkan enam elemen utama penyebab terjadinya kecurangan, yaitu stimulus (tekanan), *Capability* (kemampuan), *opportunity* (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), *Collusion* (kolusi), dan ego. Keenam komponen ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif

tentang mengapa seseorang melakukan tindakan fraud, terutama dalam konteks organisasi pemerintahan.

Stimulus atau tekanan merupakan dorongan yang berasal dari kebutuhan pribadi atau tekanan eksternal seperti target anggaran dan harapan atasan, yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Dalam lingkungan OPD, tekanan tersebut dapat muncul akibat tuntutan birokratis atau keinginan mempertahankan reputasi. *Capability* menunjukkan adanya kemampuan, kecerdasan, dan posisi strategis individu yang memudahkan ia melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan posisi tertentu dan penguasaan sistem akuntansi memiliki potensi lebih besar untuk menyalahgunakan kewenangan, apalagi jika gaya kepemimpinan di lingkungan organisasi tidak berjalan efektif.

Selanjutnya, *opportunity* atau kesempatan menggambarkan lemahnya pengendalian internal, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang membuka celah terjadinya fraud. Ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *good governance*, di mana implementasi yang lemah terhadap akuntabilitas dan transparansi akan memperbesar peluang kecurangan. Rationalization atau rasionalisasi mengacu pada proses pembenaran atas tindakan fraud oleh pelaku, seperti menganggap bahwa tindakan tersebut lumrah atau terpaksa dilakukan. Budaya etis organisasi yang kuat dapat menekan kecenderungan ini dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada seluruh anggota organisasi.

Collusion atau kolusi menggambarkan keterlibatan dua pihak atau lebih dalam melakukan kecurangan secara bersama-sama, yang memperumit deteksi dan penindakan fraud. Kolusi dapat terjadi antarpegawai atau antara pimpinan dan bawahan, sehingga penerapan sistem pengawasan berlapis dan prinsip checks and balances dalam *good governance* menjadi sangat penting untuk mencegahnya. Terakhir, ego merupakan elemen baru yang diperkenalkan dalam Fraud Hexagon, yang menggambarkan sifat ambisius, keinginan mengontrol, dan rasa superioritas seseorang yang mendorong tindakan curang. Ego sangat terkait dengan gaya kepemimpinan, di mana pemimpin yang otoriter dan tidak terbuka terhadap kritik cenderung menciptakan lingkungan kerja yang permisif terhadap fraud.

Dengan demikian, teori Fraud Hexagon memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis kecenderungan kecurangan akuntansi dalam penelitian ini. Implementasi *good governance* berkaitan erat dengan pengurangan kesempatan dan kolusi, budaya etis organisasi menekan rasionalisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap ego dan kapabilitas individu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap setiap elemen dalam teori ini menjadi penting dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam konteks organisasi sektor publik.

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Kieso (2018), Fraud merupakan suatu tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh seorang karyawan demi keuntungan pribadi yang merugikan perusahaannya. Kecenderungan kecurangan akuntansi didefinisikan oleh Thoyibatun (2009) sebagai perilaku fraud yang meliputi penyalahgunaan aset, pelanggaran kepercayaan, atau tindakan ilegal yang terkait dengan keuangan. Praktik fraud diklasifikasikan oleh ACFE (2018) dalam bentuk fraud Tree atau disebut dengan 3 cabang utama fraud yaitu korupsi, penyalahgunaan aset perusahaan serta kecurangan laporan keuangan yang mana yang paling sering terjadi pada jenis kecurangan ini yaitu adalah korupsi.

Fraud bisa dilakukan oleh siapa saja di berbagai level dalam organisasi, mulai dari pimpinan teratas sampai staf terbawah, pendapat ini dikemukakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Wilopo (2006) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah perilaku yang didorong dan disengaja, yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara parsial baik dari dalam maupun luar organisasi.

Implementasi *good governance*

Good governance merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi dalam mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan. FCGI menjelaskan bahwa *good governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan melalui aturan yang menghubungkan berbagai pihak seperti pihak pemegang saham, pihak pengurus, pihak kreditur, pihak karyawan serta pemangku kepentingan lainnya, baik secara internal maupun eksternal yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Sulistiyandari et al., 2024).

Menurut Mardiasmo dalam Rizqia & Diah (2022) suatu penyelenggaraan manajemen dalam pembangunan yang memiliki tanggungjawab, kokoh serta selaras dengan prinsip demokrasi yang ada serta pasar efisien disebut dengan *good governance*. Dalam menerapkan *good governance* mencakup hal pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif dengan penghindaran dan pencegahan dari kesalahan alokasi dana investasi, penegakan disiplin terkait alokasi anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik dalam upaya mendukung perkembangan organisasi.

Budaya Etis Organisasi

Robbins dalam Yulia et al. (2021) mengemukakan definisi budaya etis organisasi sebagai kumpulan persepsi yang membentuk sistem serta memiliki makna bagi anggota suatu organisasi yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Arti dari budaya organisasi sendiri merupakan kumpulan nilai dan asumsi yang dimiliki suatu perusahaan bersama dengan anggota organisasi yang digunakan untuk membimbing anggota dalam melakukan sesuatu dengan cara dan arah yang benar juga kumpulan nilai serta asumsi yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang digunakan untuk membimbing mereka dalam melakukan sesuatu dengan cara dan arah yang benar (Wardah et al., 2022).

Good Governance, Budaya Etis, dan Kepemimpinan: Implikasinya pada Kecurangan Akuntansi di OPD Kampar (Setyo Ardian Topan, Andreas, dan Rusli)

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan diartikan sebagai suatu kemampuan dalam memberikan wawasan sehingga suatu individu lain dapat terdorong untuk mencapai tujuannya. Gaya kepemimpinan sendiri merupakan pola perilaku yang biasa dipakai oleh seorang pemimpin dalam upaya memengaruhi perilaku orang lain, yang bertujuan menjelaskan persepsi antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi agar tercapai kesepakatan (Kamal et al., 2019).

Gaya kepemimpinan merupakan suatu bentuk strategi dalam memimpin suatu lembaga atau organisasi (Wijayanto, 2020). Sebagai tambahan, Miftah dalam (Fahmi, 2021) memandang gaya kepemimpinan sebagai norma perilaku yang menjadi pedoman dalam memimpin dan mengarahkan perilaku anggota tim. Menurut Luthans dalam (Wulandari et al., 2020), gaya kepemimpinan ialah sebuah metode yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam upaya memengaruhi bawahannya supaya mengikuti arahan demi mencapai tujuan bersama yakni tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut tidak disukai oleh beberapa orang. Komunikasi konsisten yang dipraktikkan oleh pemimpin dalam menjalankan kelompok juga merupakan bagian dari gaya kepemimpinan yang memungkinkan kerjasama antar anggota tim.

Pengaruh Implementasi *good governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Dalam kerangka *Fraud Hexagon Theory*, rasionalisasi merupakan salah satu elemen utama yang memungkinkan seseorang membenarkan tindakan kecurangan akuntansi. Individu yang memiliki jabatan strategis atau pengaruh di dalam organisasi dapat dengan mudah membenarkan perilaku menyimpang jika mereka merasa bahwa sistem organisasi tidak transparan atau tidak akuntabel. Dalam konteks ini, *good governance* memainkan peran kunci dalam menekan ruang bagi pelaku untuk melakukan rasionalisasi. Tiga prinsip utama dalam *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, secara langsung berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap potensi terjadinya *fraud*.

Secara kausal, penerapan *good governance* dapat mengurangi kecenderungan kecurangan melalui pembentukan sistem organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi menciptakan kondisi di mana informasi mudah diakses dan dimonitor, sehingga peluang manipulasi data menjadi lebih kecil. Partisipasi memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mengurangi dominasi satu pihak yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Akuntabilitas mewajibkan setiap individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, sehingga membatasi ruang gerak bagi pelaku *fraud*. Dengan demikian, *good governance* menekan komponen *opportunity*, *collusion*, dan *rationalization* dalam *Fraud Hexagon*.

Temuan empiris memperkuat asumsi ini. Rizqia & Diah (2022) menunjukkan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, yang berarti bahwa semakin baik tata kelola organisasi, semakin kecil peluang terjadinya kecurangan. Sebaliknya, Pangestutie (2018) justru menemukan pengaruh positif *good governance* terhadap *fraud*, mengindikasikan bahwa implementasi yang tidak substansial hanya menjadi formalitas tanpa penguatan sistem pengendalian yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas *good governance* sangat bergantung pada konsistensi implementasinya.

Hipotesis 1: Implementasi *good governance* Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Budaya etis organisasi berkaitan erat dengan komponen *rationalization* dan *opportunity* dalam *Fraud Hexagon Theory*. Ketika budaya organisasi menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sebagai prinsip dasar, maka individu dalam organisasi akan memiliki standar moral internal yang kuat. Hal ini akan mempersempit ruang bagi mereka untuk membenarkan tindakan *fraud*, sekalipun berada dalam kondisi penuh tekanan. Sebaliknya, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran justru mendorong normalisasi kecurangan sebagai strategi bertahan atau mencapai target tertentu.

Secara kausal, budaya etis bekerja dalam dua arah: secara internal, ia membentuk sistem nilai yang mengatur perilaku individu; secara eksternal, ia menciptakan sistem sosial organisasi yang kolektif dalam mengawasi dan mengoreksi penyimpangan. Ketika budaya etis lemah, maka *rationalization* menjadi lebih mudah dilakukan karena tidak ada tekanan moral dari lingkungan sosial organisasi. Budaya etis yang kuat juga mempersempit *opportunity*, karena semua anggota organisasi merasa bertanggung jawab atas integritas bersama.

Penelitian sebelumnya menunjukkan konsistensi pengaruh ini. Dewi & Wirakusuma (2019), Chandrayatna & Sari (2019), membuktikan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tingkat etika organisasi, semakin rendah kemungkinan *fraud* terjadi. Namun, Fanny Yulia et al. (2021) menemukan hasil berbeda, yakni pengaruh positif budaya etis terhadap *fraud*, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dideklarasikan dan kenyataan dalam praktik organisasi.

Hipotesis 2: Budaya Etis Organisasi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Gaya kepemimpinan berperan penting dalam membentuk etos kerja, sistem pengawasan, dan pola hubungan sosial di dalam organisasi. Dalam *Fraud Hexagon Theory*, gaya kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan elemen *ego*, *Capability*, dan secara tidak langsung *opportunity*. Pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan cenderung otoriter

memperbesar peluang fraud karena menciptakan ketimpangan informasi, lemahnya kontrol timbal balik, serta atmosfer organisasi yang menormalisasi penyimpangan demi kepentingan pimpinan. Sebaliknya, pemimpin yang etis dan kolaboratif mendorong integritas melalui keteladanan dan pengawasan partisipatif.

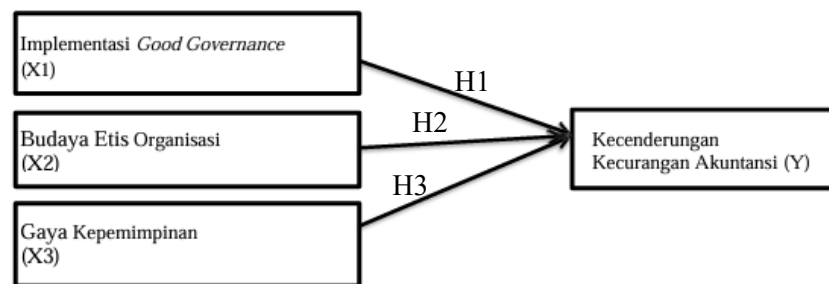
Secara kausal, gaya kepemimpinan yang tidak etis dapat meningkatkan kecenderungan fraud karena memperbesar *ego* (dorongan untuk mencapai tujuan dengan cara apa pun), memfasilitasi *Capability* (melalui akses penuh terhadap sistem), dan membuka *opportunity* (karena lemahnya kontrol). Pemimpin dengan gaya demokratis dan transparan dapat menekan potensi fraud dengan membentuk budaya komunikasi terbuka dan evaluasi kinerja yang objektif. Gaya kepemimpinan yang tidak berorientasi pada nilai-nilai integritas justru memicu pembenaran kecurangan sebagai bentuk loyalitas atau strategi bertahan dalam sistem yang represif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam Wijayanto (2020) menemukan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan fraud, yang mengindikasikan gaya otoriter atau manipulatif justru memperkuat fraud. Namun, studi (Dewi & Wirakusuma, 2019), membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud, terutama ketika pemimpin berperan sebagai role model etis di dalam organisasi. Oleh karena itu, pengaruh gaya kepemimpinan sangat bergantung pada nilai, etos, dan cara pemimpin mengeksekusi kekuasaan.

Hipotesis 3: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Model Penelitian

Kerangka konseptual berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menunjukkan Bagaimana hubungan antara variabel dengan variabel lain dalam penelitian ini. Variabel dependent yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan variabel independen Dalam penelitian ini terdiri dari implementasi *good governance*, budaya etis organisasi, dan gaya kepemimpinan. Hubungan pengaruh antar variabel ini dapat dijelaskan secara visual melalui diagram yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian terlaksana pada OPD yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. OPD berfungsi sebagai pelaksana tugas eksekutif yang memiliki tugas untuk saling berkoordinasi guna mencapai tujuan pelaksanaan pemerintahan yang berjalan dengan baik. Pada kabupaten Kampar terdapat 30 OPD, mencakup 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 21 Dinas serta 6 Badan.

Populasi penelitian dalam penelitian terdiri dari seluruh pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Kampar. Metode *purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel penelitian ini yaitu pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Dari setiap OPD, diambil tiga responden yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan informasi terkait akuntansi yang tersedia sehingga mampu memberikan data penelitian yang dibutuhkan. Responden yang dipilih meliputi Kepala Keuangan, Bendahara Keuangan, dan Kasubbag Keuangan.

Selain itu, responden harus telah menjabat minimal satu tahun di OPD tersebut dan memiliki pendidikan minimal Diploma 3 (D3), dengan pertimbangan bahwa mereka telah memahami kondisi dan situasi di OPD masing-masing. Dengan demikian, total sampel penelitian ini berjumlah 90 orang, dengan cakupan 30 OPD di Pemerintah Kabupaten Kampar.

Table 1. Daftar OPD dan Sampel di Pemerintah Kabupaten Kampar

No.	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Inspektorat	3
4	Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga	3
5	Dinas Kesehatan	3

No.	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar	Jumlah Responden
6	Dinas Sosial	3
7	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	3
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB	3
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3
15	Dinas Perhubungan	3
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
17	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3
18	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	3
19	Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan	3
20	Dinas Perikanan	3
21	Dinas Ketahanan Pangan	3
22	Dinas Lingkungan Hidup	3
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3
24	Dinas Polisi Pamong Praja	3
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
28	Badan Pendapatan Daerah	3
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah	3
Total		90

Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kampar (www.Kampar.go.id) (2024)

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dikirimkan kepada Kepala Bagian Keuangan, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada OPD Kabupaten Kampar. Data primer dikumpulkan dari kuesioner berbasis pendapat responden secara individual, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti kepustakaan, literatur, penelitian terdahulu, dan buku yang relevan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner, sementara analisis data menggunakan regresi linier berganda dan dibantu oleh perangkat lunak SPSS 26 untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini kuesioner telah disebar sebanyak 90 kuesioner pada OPD di Kabupaten Kampar, namun kuesioner yang kembali sebanyak 72 kuesioner, sedangkan 18 kuesioner lainnya tidak Kembali. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 72 kuesioner.

Statistik deskriptif digunakan dalam upaya memberikan gambaran umum tentang data dengan melihat minimum dan maksimum nilai serta rata-rata nilai dan sebaran data melalui standar deviasi untuk setiap variabel (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini variabel bebas yang dianalisis meliputi implementasi *good governance*, budaya organisasi, serta gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh terhadap Variabel terikat yaitu kecenderungan akuntansi di OPD Kabupaten Kampar. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif variabel-variabel tersebut:

Table 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi <i>good governance</i>	72	12	30	25.43	2.621
Budaya Etis Organisasi	72	14	25	19.93	2.422
Gaya Kepemimpinan	72	17	25	21.01	1.975
Kecenderungan Kecurangan Akutansi	72	13	31	17.88	3.044

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil output dari SPSS 26 yang terdapat pada tabel 2 menunjukkan jumlah sampel yang valid (Valid N) dalam penelitian ini adalah 72. Sampel tersebut diperoleh melalui kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada OPD di Kabupaten Kampar. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh data sampel dapat digunakan untuk

analisis karena tidak ada data yang hilang.

Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan demi memastikan sebaran kuesioner kepada responden benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Cara mengujinya melalui perbandingan nilai korelasi (r hitung) dari setiap pertanyaan dengan nilai batas (r table). Jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel, maka item pertanyaan tersebut dianggap valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dengan jumlah responden sebanyak 72, nilai r tabel yang digunakan adalah 0,2319.

Table 3. Hasil Uji Validitas Data

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)			
Item	Corrected Item – Total Correlation	Cutt Off of Value	Keterangan
Y1	0.54	0.30	Valid
Y2	0.55	0.30	Valid
Y3	0.59	0.30	Valid
Y4	0.36	0.30	Valid
Y5	0.48	0.30	Valid
Y6	0.49	0.30	Valid
Y7	0.40	0.30	Valid
Y8	0.49	0.30	Valid
Y9	0.47	0.30	Valid
Y10	0.59	0.30	Valid
Implementasi <i>good governance</i> (X1)			
Item	Corrected Item – Total Correlation	Cutt Off of Value	Keterangan
X1.1	0.43	0.30	Valid
X1.2	0.55	0.30	Valid
X1.3	0.69	0.30	Valid
X1.4	0.72	0.30	Valid
X1.5	0.33	0.30	Valid
X1.6	0.39	0.30	Valid
Budaya Etis Organisasi (X2)			
Item	Corrected Item – Total Correlation	Cutt Off of Value	Keterangan
X2.1	0.74	0.30	Valid
X2.2	0.62	0.30	Valid
X2.3	0.62	0.30	Valid
X2.4	0.45	0.30	Valid
X2.5	0.65	0.30	Valid
Gaya Kepemimpinan (X3)			
X3.1	0.57	0.30	Valid
X3.2	0.52	0.30	Valid
X3.3	0.63	0.30	Valid
X3.4	0.76	0.30	Valid
X3.5	0.47	0.30	Valid

Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan analisis *Corrected Item – Total Correlation*, seluruh item pada variabel Budaya Etis Organisasi (X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3) memiliki nilai korelasi di atas nilai cut off of value sebesar 0.30. Item akan dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar nilai cut off of value. Validitas ini menjadi pembuktian bahwa setiap item dalam kuesioner mampu mengukur dengan tepat sejauh mana responden memahami dan memberikan jawaban yang sesuai dengan maksud dari pertanyaan. Oleh karena itu, semua pernyataan yang disusun oleh peneliti terbukti dapat digunakan sebagai instrumen yang tepat dan sah untuk diterapkan dalam tahap pengujian selanjutnya, sesuai dengan tujuan utama dari uji validitas tersebut.

Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan tingkat kepercayaan instrumen tersebut dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai α lebih dari 0,60. Dengan kata lain, jika nilai α melebihi 0,60, instrumen tersebut dianggap dapat dipercaya dan layak digunakan untuk pengumpulan data.

Table 4. Hasil Uji Reliabilitas Data

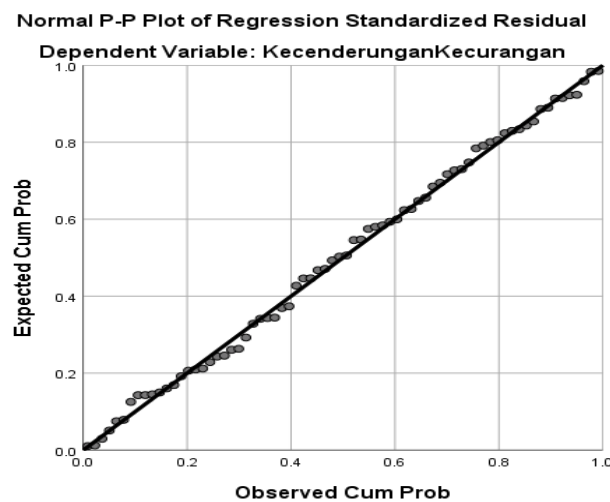
No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Implementasi <i>good governance</i>	0.606 > 0.60	Reliabel
2.	Budaya Etis Organisasi	0.605 > 0.60	Reliabel
3.	Gaya Kepemimpinan	0.697 > 0.60	Reliabel
4.	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0.645 > 0.60	Reliabel

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik, yang membuktikan bahwa alat ukur tersebut dapat dipercaya dan digunakan dengan tepat untuk pengumpulan data. Hal ini tercermin dari nilai koefisien alpha yang melampaui batas minimum 0,60. Semakin tinggi nilai konsistensi suatu alat ukur, semakin besar pula tingkat keyakinan terhadap hasil pengukuran yang diperoleh.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan demi memastikan apakah nilai residual mengikuti distribusi yang normal. Dalam model regresi yang ideal, residual harus terdistribusi secara normal agar hasil analisis regresi dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Untuk pendeteksian normalitas residual, dapat dilakukan melalui analisis grafik maupun analisis statistik. Berdasarkan hasil uji dengan metode p-plot, hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data Olahan (2024)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar yang ditampilkan, tampak bahwa titik residual tersebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut, yang menunjukkan residual berdistribusi normal. Agar memperkuat kesimpulan visual tersebut, dilakukan juga uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai metode tambahan untuk menilai normalitas residual secara lebih rinci. Untuk memverifikasi apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas, uji ini dilakukan. Asumsi normalitas pada model regresi dapat dikatakan terpenuhi apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Tabel berikut menyajikan hasil uji normalitas residual ini.

Table 5. Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		72
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.61037242
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	.066
	Positive	.058
	Negative	-.066
<i>Test Statistic</i>		.066
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan (2024)

Diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 5.5. Karena nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, data dalam penelitian dapat digunakan. Oleh karena itu, hasil analisis regresi dianggap valid secara statistik.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi, pengujian multikolinearitas dilakukan. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan bahwa model regresi tidak terpengaruh oleh multikolinearitas. Jika nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Uji ini bertujuan memastikan bahwa hubungan antar variabel independen dalam model regresi tidak berlebihan. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut:

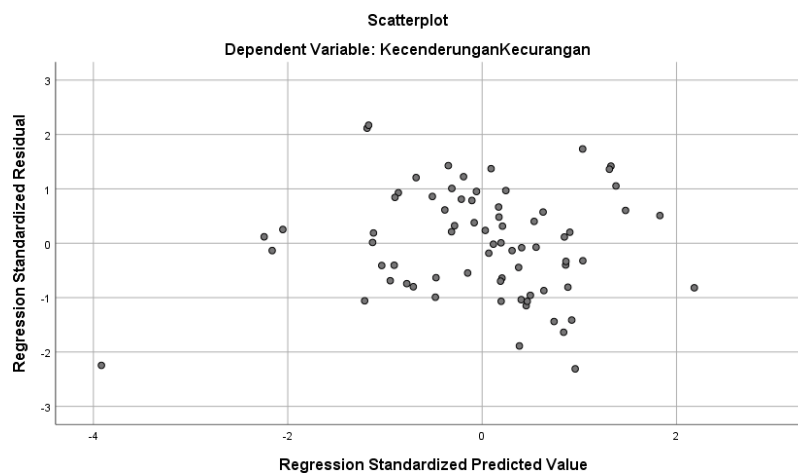
Table 6. Hasil Multikolinearitas Data

		<i>Collinearity Statistic</i>	
	<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>Implementasi Good Governance</i>	.974	1.027
	<i>Gaya Kepemimpinan</i>	.687	1.456
	<i>Budaya Etis Organisasi</i>	.674	1.483

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan varian residual antar pengamatan dalam model regresi. Idealnya, model regresi yang baik adalah yang tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas.



Sumber: Data Olahan (2024)

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3, hasil uji heteroskedastisitas melalui tampilan scatterplot pada variabel dependen Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menunjukkan bahwa titik residual yang tersebar acak di atas dan di bawah sumbu Y. Pola sebaran tersebut memperlihatkan tidak adanya pola tertentu, sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah terlepas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh linier antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Teknik ini berperan dalam mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Table 7. Hasil Analisis Linear Berganda

	Model	Coefficients		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	
1	(Constant)	15.685	.998		.000
	Implementasi <i>good governance</i>	-.194	.069	-.264	.007
	Gaya Kepemimpinan	-.389	.071	-.497	.000
	Budaya Etis Organisasi	-.143	.066	-.207	.035

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa persamaan model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 15,685 - 0,194 X_1 - 0,389 X_2 - 0,143 X_3$$

Hasil Uji Parsial (T- Test)

Pengujian selanjutnya dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel pada tingkat signifikansi 5%. Apabila H_0 ditolak dan hipotesis diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Table 8. Uji Parsial (t-test)

Model	t Tabel	T	Sig	Keterangan
Implementasi <i>good governance</i>	1,667	2.797	.007	Diterima
Gaya Kepemimpinan	1,667	5.513	.000	Diterima

Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel output yang disajikan, dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas yang diteliti memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Variabel Kepemimpinan mencatat nilai t hitung sebesar 5,513, yang melebihi t tabel, dengan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan kontribusi signifikan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, variabel Penerapan *Good governance* memiliki nilai t hitung 2,797, lebih tinggi dari t tabel sebesar 1,667, dan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* secara signifikan memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Variabel Etika Organisasi juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai t hitung sebesar 2,156 yang melebihi t tabel, dan nilai signifikansi 0,035, menandakan dampak penting variabel ini terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan demikian, secara statistik ketiga variabel bebas tersebut terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di lingkungan OPD Kabupaten Kampar.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R Square mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan. Dengan nilai Adjusted R Square yang tinggi, model penelitian mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen dengan lebih baik.

Table 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	.480	.457	2.243

Sumber: Data Olahan (2024)

Koefisien korelasi sebesar nilai 0,693 atau 69,3% menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen penerapan *good governance*, gaya kepemimpinan, dan budaya etis organisasi dengan variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi. Koefisien korelasi (r) ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel tersebut saling berkaitan.

Sedangkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,457 menunjukkan bahwa 45,7% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu implementasi *good governance*, gaya kepemimpinan, dan budaya etis organisasi. Sisanya, yaitu 54,3%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang digunakan. Uji ini bertujuan menilai seberapa baik model analisis dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi *good governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Penerapan variabel *good governance* dalam sektor pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui seperangkat aturan yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak, seperti pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya (Ratnayani, 2014).

Pada Tabel 5.8, hasil uji-t menunjukkan nilai t hitung $-2,797$ yang secara absolut melebihi t tabel $1,667$, dengan signifikansi $0,007$ lebih kecil dari $0,05$. Pengaruh signifikan antara penerapan *good governance* dan kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti dari penolakan H_0 dan diterimanya H_a . Hipotesis pertama dalam penelitian ini, dengan demikian, secara statistik terbukti.

Pengendalian pihak internal yang efektif serta berkurangnya asimetri informasi dan tata kelola yang baik pada satuan kerja perangkat daerah dapat mengurangi kecurangan akuntansi. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh satuan kerja perangkat daerah lebih tepat, mengingat setiap divisi manajemen memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang lingkungannya. Selain itu, pengendalian internal yang efektif memungkinkan pengawasan terhadap implementasi strategi, membantu menghindari kesalahan dan memfasilitasi pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung dalam Tabel 5.8. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $5,513$ dan nilai signifikansi $0,000$, yang secara statistik jauh lebih kuat dibandingkan variabel lainnya, yakni *implementasi good governance* ($2,797$; sig. $0,007$) dan *budaya etis organisasi* ($2,156$; sig. $0,035$). Selain itu, nilai koefisien beta standar sebesar $0,497$ juga merupakan yang terbesar secara absolut, mengindikasikan bahwa kontribusi gaya kepemimpinan dalam memengaruhi variabel dependen jauh lebih besar dibandingkan dua variabel lainnya dalam model.

Menurut Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953), yang menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena kombinasi dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan berperan penting dalam mengendalikan dua dari tiga elemen utama penyebab fraud, yakni kesempatan (melalui pengawasan dan pengendalian internal) dan rasionalisasi (melalui penanaman nilai etis dan integritas organisasi). Dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, individu dalam organisasi akan cenderung menolak rasionalisasi untuk melakukan kecurangan, meskipun tekanan tetap ada.

Dari sisi praktis, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang bersifat langsung dan melekat pada individu pemimpin, sehingga lebih efektif dibandingkan variabel lain seperti sistem tata kelola atau budaya organisasi yang memerlukan waktu lebih panjang untuk terbentuk secara menyeluruh. Seorang pemimpin dapat memberikan efek jangka pendek melalui keputusan, instruksi, dan pengawasan harian, sekaligus membentuk efek jangka panjang melalui nilai dan keteladanan. Hal ini yang menyebabkan gaya kepemimpinan muncul sebagai variabel paling dominan dalam model ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dapat mencegah atau justru memfasilitasi kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini menjadi penting sebagai masukan bagi organisasi untuk memastikan proses rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan terhadap kepemimpinan dilakukan secara ketat demi menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari fraud.

Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi diuji dalam hipotesis ketiga penelitian ini. Tabel 5.8 menunjukkan nilai t hitung $5,513$ yang melampaui t tabel $1,667$, dengan signifikansi $0,000$ yang berada di bawah $0,05$. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya budaya etis organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Budaya etis organisasi memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku pegawai di lingkungan kerja. Organisasi yang membangun dan menegakkan budaya etika yang kuat cenderung memiliki risiko kecurangan yang lebih rendah. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi menjadi fondasi yang membimbing pegawai dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan bermoral. Sebaliknya, ketika organisasi mengabaikan pentingnya etika, maka ruang untuk rasionalisasi kecurangan semakin terbuka lebar. Budaya etis yang lemah cenderung menciptakan lingkungan yang permisif terhadap tindakan curang, terutama karena lemahnya pengawasan serta rendahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Budaya etis tidak hanya mencerminkan nilai-nilai institusional, tetapi juga membentuk pola pikir, perilaku, dan cara bertindak para anggota organisasi. Organisasi dengan budaya yang positif mampu mendorong individu untuk berperilaku etis, sementara organisasi dengan budaya yang buruk cenderung menjerumuskan anggotanya ke dalam tindakan yang menyimpang, termasuk dalam hal manipulasi laporan keuangan.

Dengan demikian, penting bagi setiap OPD maupun lembaga pemerintah lainnya untuk menanamkan dan menegakkan budaya etika yang konsisten. Hal ini tidak hanya menjaga integritas laporan keuangan, tetapi juga menjaga reputasi organisasi di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Good Governance, Budaya Etis, dan Kepemimpinan: Implikasinya pada Kecurangan Akuntansi di OPD Kampar (Setyo Ardian Topan, Andreas, dan Rusli)

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan prinsip *good governance*, gaya kepemimpinan, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Implementasi *good governance* yang baik mampu menekan potensi fraud melalui penguatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Gaya kepemimpinan yang etis dan komunikatif memperkecil ruang bagi perilaku menyimpang. Sementara itu, budaya etis organisasi yang kuat mendorong internalisasi nilai integritas, sehingga meminimalkan tindakan kecurangan dalam sistem akuntansi pemerintahan.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat validitas *Fraud Hexagon Theory*, khususnya terkait komponen *rationalization*, *opportunity*, *ego*, dan *Capability*. Implementasi *good governance* dan budaya etis secara langsung menghambat pembentukan rasionalisasi dan mempersempit peluang kecurangan. Gaya kepemimpinan berkontribusi pada aspek *ego* dan *Capability*, yang sebelumnya belum banyak diuji dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memberi kontribusi pada pengembangan literatur perilaku organisasi publik, khususnya dengan pendekatan multidimensi terhadap pencegahan fraud di sektor publik. Secara praktis, hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah terutama OPD di Kabupaten Kampar untuk memperkuat sistem tata kelola yang transparan, membangun budaya etika yang konsisten, dan mendorong gaya kepemimpinan yang akuntabel serta kolaboratif. Ketiga aspek ini harus berjalan secara simultan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang minim risiko kecurangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan lokasi penelitian hanya terbatas pada OPD di Kabupaten Kampar, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki karakteristik organisasi berbeda. Kedua, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan survei, sehingga tidak menangkap secara mendalam konteks kultural atau praktik informal yang bisa memengaruhi fraud. Ketiga, variabel yang digunakan hanya mencakup tiga faktor, sementara *Fraud Hexagon Theory* memiliki enam komponen utama.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, direkomendasikan agar OPD di Kabupaten Kampar melakukan langkah konkret dalam menangkal fraud. Pertama, membentuk unit pengendalian internal yang independen dan memperkuat fungsi audit internal. Kedua, menyelenggarakan pelatihan integritas dan etika bagi seluruh pegawai secara berkala. Ketiga, menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman dan terpercaya. Keempat, memilih dan menempatkan pemimpin berdasarkan kompetensi, rekam jejak integritas, serta kemampuan manajerial. Di sisi akademik, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah variabel lain dalam Fraud Hexagon seperti *Collusion* dan *stimulus*, serta menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, R. P. (2020). Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Sistem Pengendalian Intern, Penegakan Peraturan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Opd Di Kabupaten Magelang). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Makelar Proyek Rsud Bangkinang Wajib Kembalikan Kerugian Negara Rp4 Miliar. <https://Riau.Bpk.Go.Id/Makelar-Proyek-Rsud-Bangkinang-Wajib-Kembalikan-Kerugian-Negara-Rp4-Miliar/>
- Badewin. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Skpd Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1).
- Chandrayatna, I. D. G. P., & Sari, M. M. R. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Etis Organisasi Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1063. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P09>
- Dewi, N. K. A. A., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Intern Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 64. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I01.P05>
- Fahmi, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Motivasi, Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Organisasi Budaya (Studi Literatur Manajemen Sumber Daya). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 52–67. <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V3i1>
- Haluan Riau. (2021). Kajari Kampar Targetkan Ungkap Lima Perkara Korupsi Tahun Ini, Dua Kasus Berjalan. <https://Riau.Harianhaluan.Com/Daerah/Pr-11452065/Kajari-Kampar-Targetkan-Ungkap-Lima-Perkara-Korupsi-Tahun-Ini-Dua-Kasus-Berjalan>
- Kamal, F., Winarso, W., & Sulistio, E. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus : Pt Agung Citra Transformasi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (Jiam)*, 15(2).
- Pangestutie, I. A. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Opd Di Kabupaten Blitar). Universitas Brawijaya.
- Putri, S. Y., Wilasitha, A. A., Veteran, U. ", & Timur, J. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. 1(2), 726–735.

- Rizqia, L., & Diah, W. T. (2022). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Opd Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 2022. <https://Journal.Ikopin.Ac.Id/Index.Php/Fairvalue>
- Sagala, S. G., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2).
- Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Cv. Alfabeta.
- Sulistyandari, Hidayat, C. M., & Sunarko, B. (2024). Pentingnya Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Reputasi Dan Kinerja Perusahaan. Penerbit Adab.
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Fraud Prevention. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2).
- Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan Dan Kecenderungan Fraud Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1).
- Wulandari, W., Herika Hermanu, D., & Bernarto, I. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Optimisme Karyawan Terhadap Employee Performance. *Jimea; Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3).
- Yulia, F., Anugerah, R., & Azlina, N. (2021). Budaya Etis Organisasi Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Feasible*, 3(1).